

## ABSTRAK

Nazarrudin, 10220041. **Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, M.Hi.

---

**Kata Kunci: Pelayanan, Penumpang, Sanksi Hukum, Konsep Ta'zir.**

Usaha jasa transportasi merupakan sektor bisnis profit yang sangat penting dalam perkembangan Nasional dan kegiatan masyarakat luas, khususnya dalam perkembangan ekonomi. Namun, terkadang bisnis tersebut tidak sepenuhnya mewujudkan pelayanan terbaik bagi penumpang sebagai pengguna jasa yang seharusnya bisa diakomodasi dengan baik oleh pihak pengusaha jasa. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya pengusaha jasa bus patas sering kali tidak memperhatikan secara baik untuk memenuhi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik pengusaha jasa maupun penumpang. Adapun kasus-kasus yang terjadi seperti pengemudi sering tidak mengenakan sabuk pengaman, ugal-ugalan, dan fasilitas tidak sepenuhnya ada. Kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan tersebut seharusnya mendapatkan tindakan hukum yang tegas berupa sanksi hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menghukum bagi pengusaha jasa transportasi yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana sanksi hukum buruknya pelayanan bus patas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan? 2) bagaimana sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam? Sedangkan penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa sanksi hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi penumpang sebagai pengguna jasa serta pelanggaran selalu terjadi berkelanjutan. Sanksi hukum oleh Undang-Undang tersebut sesuai dengan konsep ta'zir dalam Islam yang identik dengan kriteria hukuman Ta'zir tersebut. Masalah lain adalah pengawasan oleh pejabat berwenang juga tidak begitu efektif dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan bagi semua penumpang. Selayaknya peraturan perundang-undangan bisa memberikan efek positif dalam mengatur dan menegakkan hukum.